KRITIK DALAM MASYARAKAT JAWA: SEBUAH KAJIAN PEMBERDAYAAN FUNGSI BAHASA SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL

Edy Jauhari
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya
Mahasiswa Pascasarjana UNS Surakarta

1. Pendahuluan

Dalam perspektif sosiologi, kritik dipandang sebagai salah satu bentuk kontrol sosial. Sebagai sebuah bentuk kontrol sosial, kritik bersifat persuasif dan retrospekif, yakni membenahi, mengendalikan, dan mengembalikan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dengan kata-kata verbal. Makalah ini mengkaji tindak tutur kritik dalam masyarakat Jawa dalam fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Menurut hemat penulis, kritik dalam fungsinya sebagai sarana kontrol sosial ini sangat menarik diamati. Di satu sisi, masyarakat Jawa secara cultural sangat menjaga prinsip kerukunan dan prinsip hormat (Magnis-Suseno, 1988). Di sisi lain kritik merupakan tindakan linguistik yang rawan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik diajukan adalah bagaimana orang Jawa melakukan kritik dengan tetap menjaga prinsip kerukunan dan prinsip hormat? Strategi-strategi kritik seperti apa yang mereka berdayakan? Pertanyaan ini akan dicoba dijawab dalam makalah ini.

Teori yang dimanfaatkan adalah teori Brown dan Levinson (1987) tentang strategi bertutur. Data dijaring melalui kuesioner. yang disebarkan ke kantor-kantor atau instansi pemerintah atau swasta di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya dengan jumlah 50 buah. Kuesioner ini berisi dua permintaan. Pertama, permintaan kepada responden untuk membuat contoh kritik dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini responden diberi dua kasus tentang disiplin yang diandaikan terjadi di kantor tempat responden bekerja. Kasus pertama menggambarkan tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh pimpinan. Kasus kedua menggambarkan tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh bawahan. Kemudian, responden diminta melakukan kritik sesuai dengan konteks situasi, yakni +K-S +P dan –K-S+P. Kedua, permintaan kepada responden memberikan alasan kultural, seandainya responden lebih memilih strategi diam saja, tidak melakukan kritik atau hanya melakukan kritik dalam hati atau *don't do the FTA.* Data dari kuesioner itu merupakan data awal yang kemudian dimatangkan atau ditriangulasikan dengan informan. Data yang sudah tersedia dianalisis secara kualitatif.

2. Pemberdayaan Strategi-Strategi Kritik dalam Konteks +K-S+P

Data menunjukkan bahwa di antara lima strategi bertutur yang dikemukakan Brown Lavinson, strategi yang cenderung dihindari atau tidak dipilih dalam konteks +K-S+P adalah strtaegi *bald on record*. Strategi yang memiliki kemungkinan dipilih adalah strategi *on record plus negative politeness,* strategi *on record plus positive politeness,* dan strategi *off record*. Di antara kelima strategi yang ada, strategi yang paling umum dipilih dalam konteks situasi +K-S+P adalah strategi diam saja atau *don't do the FTA.*

Strategi *bald on record* cenderung dihindari karena penggunaan strategi ini dalam konteks +k-S+P dipandang rawan melanggar maksim-maksim prinsip kerukunan, baik

maksim hormat, maksim andap-ashor, maksim empan papan maupun maksim tepa-slira. Pelanggaran maksim seperti itu riskan menimbulkan konflik. Padahal, masyarakat Jawa pada umumnya cenderung tidak menyukai konflik.

Berbeda dengan strategi *bald on record* yang cenderung dihindari, strategi *on record plus negative politeness*, memiliki memungkinkan lebih tinggi digunakan dalam konteks +K-S+P. Walaupun demikian, strategi ini tampaknya tetap harus digunakan dengan hati-hati dalam konteks +K-S+P. Strategi on record plus negative politeness ini biasanya digunakan dengan cara (a) terlebih dahulu meminta maaf kepada penerima kritik (b) menggunakan pagar (hedges), atau (c) menggunakan strategi tidak langsung. Di antara ketiga cara atau substrategi ini, substrategi yang dipandang paling aman adalah substrategi tidak langsung.

Strategi lain yang juga memiliki kemungkinan dipilih dalam konteks +P-S+P adalah strategi *on record plus positive politeness* dan *off record.* Yang pertama biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (a) memberikan persetujuan (b) menggunakan bentuk-bentuk identitas kelompok, dan (c) memberikan alasan. Yang kedua biasanya dilakukan dengan (a) samar-samar (vague), (b) ironi, dan (d) tidak mengacu ke petutur secara langsung. Jika dibandingkan dengan strategi *on record plus positive politeness*, strategi *off record* lebih disukai, khususnya yang dilakukan dengan substrategi samar-samar. Penggunaan substrategi samar-samar ini seimbang dengan penggunaan substrategi tidak langsung dalam strategi *on record plus negative politeness* di atas. Keduanya tidak terlalu melanggar maksim dalam prinsip kerukunan.

Di antara kelima strategi bertutur yang ada, strategi yang paling umum dipilih dalam konteks +K-S+P adalah strategi *don't do the FT* atau diam saja atau kritik hanya disampaikan di dalam hati. Karena kritik itu hanya disampaikan dalam hati, maka kontrol sosial tentu tidak berfungsi karena membiarkan keadaan menyimpang itu tetap berlangsung sebagaimana adanya. Alasan yang umum dikemukakan adalah adanya perasaan tidak enak, sungkan, atau pekewuh menyampaikan kritik dalam konteks +K-S+P. Di samping itu, substrategi ini juga digunakan untuk menghindari konflik dengan atasan.

3 Pemberdayaan Strategi Kritik dalam Konteks –K–S+P

Pemilihan strategi-strategi kritik dalam konteks situasi +K-S+P cukup kontras dengan pemilihan strategi-strategi kritik dalam konteks –K-S+P. Di antara lima strategi yang ada, strategi yang cenderung dipilih dalam konteks –K-S+P adalah strategi *bald on record* atau setidak-tidaknya strategi *on record plus negative politeness*. Strategi *on record plus positive politeness*, dan strategi *off record* meskipun memiliki kemungkinan dipilih, tetapi tampaknya tidak terlalu diminati, sedangkan strategi *don,t do the FTA* cenderung dihindari.

Jika disimak dengan baik, perbedaan kedua jenis konteks situasi yang disebutkan di atas sesungguhnya hanyalah terdapat pada parameter ±K. Tampaknya parameter ±K ini sangat penting dalam masyarakat Jawa karena dapat mengubah pemetaan pemilihan strategi-strategi ktitik. Dalam konteks +K-S-P, strategi *bal on record* cenderung sangat dihindari, padahal dalam konteks –K-S+P strategi itu justru cenderung digunakan. Dalam konteks +K-S+P, strategi *don't do the FTA* cenderung digunakan, sedangkan dalam konteks –K –S+P strategi itu justru cenderung dihindari. Perbedaan kecenderungan ini tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi tampaknya dipengaruhi oleh parameter ±K.

Pertanyaannya adalah mengapa parameter ±K begitu menentukan pemilihan strategi-strategi kritik? Tampaknya hal ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat Jawa yang cenderung bersifat hierarkhis. Ada dua hal yang bisa dicatat dalam masyarakat hierarkhis ini. Pertama, apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang kedudukan sosialnya tinggi (+K) belum tentu bisa dilakukan oleh mereka yang kedudukan sosialnya rendah. Mereka yang kedudukan sosialnya tinggi (+K) bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada mereka yang kedudukan sosialnya rendah (-K). Sebaliknya, mereka yang kedudukan sosialnya rendah (-K) belum tentu bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada mereka yang kedudukan sosialnya tinggi (+K). Mereka yang kedudukan sosialnya rendah sering harus menggunakan strategi don't do the FTA, sedangkan mereka yang kedudukan sosialnya tinggi justru cenderung menghindari penggunaan strategi *don't do the FTA*. Selanjutnya, mereka yang kedudukan sosialnya tinggi (+K) bisa menggunakan strategi *bald on record* kepada mereka yang kedudukan sosialnya rendah (-K). Sebaliknya, mereka yang kedudukan sosialnya rendah (-K) belum tentu bisa menggunakan strategi *bald on record* kepada mereka yang kedudukan sosialnya tinggi (+K). Kecenderungan ini bukan tidak beralasan, tetapi tampaknya berkaitan dengan hierarkhi sosial masyarakat Jawa.

Kedua, penutur yang kedudukan sosialnya lebih tinggi pada umumnya bisa menggunakan strategi-strategi kritik secara lebih bebas. Artinya, penutur bisa menggunakan berbagai macam strategi kritik tanpa ada rasa kekhawatiran melanggar maksim-maksim dalam prinsip kerukunan. Walaupun demikian, berdasarkan data yang diperoleh, strategi yang paling umum digunakan adalah strategi *bald on record*. Strategi ini dipilih biasanya atas pertimbangan bahwa strategi ini dipandang lebih efektif dalam melakukan kontrol terhadap bawahan. Sementara itu, strategi *on record plus negative politeness* digunakan berdasarkan pertimbangan penutur ingin bersikap lebih santun kepada bawahan. Selanjutnya, strategi on record plus positive politeness dipilih biasanya atas pertimbangan penutur ingin mengakrabkan diri dengan bawahan. Yang terakhir, strategi *don't do the FTA* hampir-hampir tidak pernah dipilih oleh penutur yang kedudukan sosialnya lebih tinggi. Barangkali pertimbangannya adalah dia sebagai atasan berkewajiban melakukan kontrol terhadap bawahan.

Sebaliknya, penutur yang lebih rendah kedudukan sosialnya (bawahan) tampaknya hanya bisa menggunakan strategi-strategi tertentu yang cukup terbatas. Penutur sebagai bawahan tidak bisa menggunakan strategi-strategi kritik secara leluasa tanpa ada kekhawatiran mengancam muka petutur yang lebih tinggi kedudukan sosialnya. Penutur tidak mungkin menggunakan strategi *bald on record* apabila strategi itu dinilai sangat mengancam muka petutur. Paling-paling yang dia bisa gunakan adalah strategi *on record plus negatif politeness* atau strategi *on record plus positive politeness* atau *off record*. Jika ketiga strategi itu ternyata masih dinilai bisa mengancam muka juga, maka satu-satunya strategi yang aman dipilih adalah strategi *don't do the FTA*.

4. Penutup

Sebagai penutup, ada poin penting yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah fakta bahwa strategi kritik yang cenderung dipilih dalam konteks situasi +K-S+P adalah strategi *don't do the FTA*. Sebaliknya, dalam konteks –K-S+P strategi yang cenderung dipilih adalah strategi *Bald on record*, sedangkan strategi don't do the FTA justru cenderung dihindari.

Makna yang bisa dipahami dari fakta di atas adalah bahwa kritik sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dalam masyarakat Jawa cenderung hanya bisa berlangsung secara *top-down*, dari atas ke bawah. Sementara itu, kritik yang bersifat *bottom-up*, dari bawah ke atas, cenderung terhambat oleh kendala budaya yang agak serius. Hal ini berarti bahwa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku oleh atasan atau pimpinan dalam sebuah kantor atau instansi, maka penyimpangan-penyimpangan tersebut cenderung tidak bisa segera dikontrol. Bawahan cenderung diam dan hanya melakukan kritik dalam hati. Paling-paling yang bisa mereka lakukan hanyalah rasan-rasan bersama kolega atau dalam bahasa Jawa *nggrundel*. Sikap *nggrundel* ini tentu tidak menyelesaikan masalah karena keadaan menyimpang itu tetap akan berlangsung terus sebagaimana adanya.

Kendala kritik yang bersifat *bottom-up* ini tampaknya ada kaitannya juga dengan struktur masyarakat Jawa yang hierarkhis tersebut. Dalam struktur hierarkhis ini, menurut Koentjaraningrat (dalam Magnis-Suseno, 1988) seorang pemimpin atau atasan hendaknya dihormati dan dilayani. Pemimpin berkewajiban melindungi bawahan dan mereka yang kedudukannya lebih rendah. Bawahan mengharapkan dari atasan perlindungan dan pedoman moral, sedangkan atasan boleh memperhitungkan pelayanan dan loyalitas dari bawahannya. Bawahan tidak mempunyai hak untuk menilai atasan, melakukan kritik atau menuntut pertanggungjawaban kepada atasan. Sebaliknya, kelakuan atasan dengan sendirinya dianggap benar dan dengan demikian menjadi standard moral yang akan ditiru oleh bawahan. Koentjaraningrat menilai fakta di atas sebagai sesuatu yang negatif. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi menjadi sulit dikontrol dan tidak bisa segera diatasi. Bahkan menurutnya, fakta seperti itu dapat memberikan suasana yang kondusif untuk melakukan korupsi.

5. Daftar Pustaka

Brown, Penelope dan S.C. Levinson. 1978. “Universals in Language Usage: Politeness Phenomena”. dalam *Question in Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 1996. “The Speech Act of Criticizing among Speakers of Javanese”. Makalah Dipresentasikan dalam Pertemuan ke-6 South East Asian Linguistiks Society. Tidak diterbitkan.

_____. 2008. “Rasa Kejawen dan Pengungkapan Tindak Tutur Pengancam Muka di Kalangan Orang Jawa” dalam Kelana Bahana Sang Bahasawan. Jakarta: Universitas Atmajaya.

Mulder, Nielas. 1999. *Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya: Jawa, Muangthai, dan Filipinan.* Terjemahan Satrio Widiatmoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Magnis Suseno, Frans. 1988. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.